

Desak KPK

Usut Mafia Migas

ICW Soroti Perusahaan Pengemplang Pajak

JAKARTA, TRIBUN - Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi pajak, yang melibatkan utang 33 perusahaan asing dan lokal migas.

Tunggakan sejumlah perusahaan migas itu mencapai US\$ 583 juta sejak 2008 hingga 2010 berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menuturkan ada 14 perusahaan asing yang menunggak membayar pajak senilai Rp 1,6 triliun. "Jadi KPK harus tindak lanjut, jangan sebar isu saja (terkait 14 perusahaan yang berhutang pajak), karena kepastian hukum soal pajak untuk masyarakat itu termasuk keadilan dalam membayar pajak," ujar Koordinator ICW, Danang



“ Kita dirugikan, karena negara berkurang penerimaannya. Seharusnya kita punya potensi mendapat anggaran sekian triliun, tapi tidak kita dapatkan. ”

FIRDAUS ILYAS

Koordinator Analisis Anggaran ICW

Widoyoko di kantor ICW, Senin (18/7).

Sementara itu, Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran dari ICW Firdaus Ilyas menyatakan KPK bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan, jika memang dalam penunggakan terdapat indikasi mafia pajak migas yang melibatkan BP Migas. Kemungkinan suap perusahaan pada badan pemerintahan bisa terjadi, sehingga terjadi tunggakan yang cukup lama.

“KPK bisa masuk jika ada

kemungkinan mafia pajak. Misalnya, kalau memang dalam pemeriksaan dan pengawasan KPK terdapat utang pajak, dimana karena perusahaan diduga memberikan suap pada pejabat BP Migas, KPK sangat bisa melakukan tindakan,” papar Firdaus.

Pembenahan

Saat ini, menurutnya ada pembenahan dalam sejumlah lembaga terkait tunggakan pajak oleh perusahaan asing Migas. Beberapa lembaga di antaranya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan BP Migas. Selain itu BPK, lanjutnya, harus melakukan verifikasi kembali, sehingga KPK dapat melihat penyimpangan yang terjadi, jika ada indikasi mafia pajak migas.

Firdaus menyatakan untuk

menagih kembali hutang 33 perusahaan migas itu, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan membayar pajak. “Kita dirugikan, karena negara berkurang penerimaannya. Seharusnya kita punya potensi mendapat anggaran sekian triliun, tapi tidak kita dapatkan. Kita harus menagih. Jangan takut untuk mengatakan bahwa itu melanggar kontrak. Jadi suara kita suara kontrak,” tandasnya.

Seperti yang diketahui, sebelumnya KPK mengungkap 14 perusahaan asing di sektor minyak dan gas tidak pernah membayar pajak selama bertahun-tahun. Akibatnya, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 1,6 triliun.

“Ada perusahaan yang tidak membayar pajak dari tahun 1991. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang tak membayar pajak selama lima kali menteri keuangan,” kata Haryono Umar, Wakil Ketua KPK, di Jakarta, Kamis (14/7/2011). Haryono tidak menyebut ke-14 perusahaan itu. “Nama-nama perusahaannya ada di Direktorat Jenderal Pajak,” ujarnya. (kpc)

Tagih Rp 50 Triliun

KOMISI Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak segera menagih tunggakan pajak perusahaan yang mencapai Rp 50 triliun. “Kami hanya mendorong (tagihan pajak) jangan sampai kadaluwarsa,” kata Haryono Umar, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, di Jakarta, belum lama ini.

Haryono tidak bersedia menyebutkan nama perusahaan penunggak pajak. “Perusahaannya banyak,” ujarnya.

Menurut Haryono, KPK mendapat informasi bahwa tunggakan pajak sebesar Rp 2,5 triliun sudah memasuki masa kadaluwarsa. Agar uang tersebut tak terbuang percuma, Komisi berencana memanggil Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany. “Kami akan segera undang Dirjen Pajak,” kata

Haryono.

Fuad Rahmany mengatakan pihaknya akan segera menagih para wajib pajak yang berutang. “Kami akan tagih. Nanti ada juru sitanya,” ujar Fuad di kantor Kementerian Keuangan.

Fuad menegaskan tidak akan memutihkan tunggakan para wajib pajak itu. “Kalau piutang, tetap saja kami catat,” katanya. Namun, Fuad tidak menetapkan tenggatnya. “Pokoknya akan kami kejar.”

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, total piutang pemerintah per Desember 2010 menyentuh angka Rp 99 triliun. Ketua BPK Hadi Purnomo menyatakan, piutang pajak merupakan yang terbesar dari total piutang lainnya. Nilainya mencapai Rp 70 triliun. (tic)

Perusahaan Pengutang Pajak Terbesar	
1. Cnoocs SES Ltd sebesar	US\$ 94.239 juta
2. ConocoPhillips (GRISSIK)	US\$ 84.774 juta
3. Petrochina International	US\$ 62.949 juta
4. Mobil Exploration Indonesia	US\$ 59.998 juta
5. VICO	US\$ 42.987 juta
6. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc	US\$ 41.763 juta
7. Premier Oil (Area Natuna Sea)	US\$ 38.368 juta
8. BP West Java Ltd	US\$ 35.123 juta
9. Star Energy	US\$ 17.095 juta
10. Pertamina EP	US\$ 16.921 juta

Perusahaan tersebar di beberapa tempat, di antaranya di wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Madura dan Sumatera